

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam anilena keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan di Indonesia.

Memperhatikan akibat pertumbuhan kemiskinan bersama-sama dengan prestasi pembangunan yang positif sifatnya, komunitas global menetapkan tahun 1996 sebagai tahun Internasional untuk pemberantasan kemiskinan. Sebelumnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang pembangunan social telah dilaksanakan untuk mendiskusikan upaya pengurangan dan penurunan kemiskinan, perluasan pekerjaan produktif dan pengembangan integrasi social. Perkembangan ini ditindaklanjuti dengan proklamasi pada tahun 1997-2006 sebagai dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pemberantasan kemiskinan dengan tema

*“Memberantas Kemiskinan merupakan tugas, etik, social, politik dan ekonomi dari kemanusiaan yang mendesak”.*¹

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi akut antara tahun 1997-1998 angka kemiskinan melonjak hingga mencapai 23,4%, bahkan meningkat setelah pemerintahan baru berulang kali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sepertinya kemiskinan menjadi masalah krusial yang melilit bangsa kita tercinta ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2006) jumlah penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan, yakni mereka yang hidup hanya dengan penghasilan US\$ 1,55 per hari sebanyak 17,75% atau sekitar +/- 39,05 juta orang. Bahkan menurut Bank Dunia, bila ukuran penghasilan dinaikkan sedikit saja menjadi US\$ 2, maka penduduk yang tergolong miskin mencapai 49% atau lebih dari 100 juta orang, sungguh ironis dengan kondisi demikian, maka masalah kemiskinan di Negara berkembang seperti Indonesia menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian lebih².

Kemiskinan sudah dipandang dari sudut yang berbeda-beda, dan tergantung pada prespektif yang digunakan, maka batasan kemiskinan juga bergeser. Dengan menggunakan pandangan kuantitatif dan materialistik, maka kemiskinan telah dibataskan sebagai “ketidakmampuan untuk

¹ Dicky Djatnika Utama, “Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Hal.1-2

² Badan Pusat Statistik, 2006

meraih standar hidup minimal”. Standar pengukuran yang digunakan untuk menilai standar hidup, termasuk barang-barang rumah tangga dan pengeluaran per kepala dan juga dimensi kesejahteraan lain, seperti kesehatan, gizi, harapan hidup, kematian balita, keaksaraan dan tingkat pendaftar disekolah serta akses pada barang-barang umum atau sumber kekayaan umum.

Menurut definisi baru, kemiskinan bukan lagi sekedar masalah kesenjangan pendapatan (*income discrepancy*), tetapi lebih kompleks lagi menyangkut ketidakberdayaan (*incapability*), ketiadaan pengetahuan dan keterampilan (*lack of knowledge and skills*) dan kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (*scarcity of capital and resource*). (Alhumani, 2006) atau *human capability* (Sen, 2000)³. Elemen dasar *human capability* adalah pendidikan yang memainkan peranan sentral dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai factor yang saling berkaitan antara lain, pendapatan, kesehatan, pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, lokasi geografis. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Definisi beranjak dari

³ Dicky Djatnika Utama, “Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Hal.1-2

pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam kehidupan secara bermartabat. Sedangkan hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan air bersih, pertahanan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan social-politik baik perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya pada Negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus kearah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi pada suatu Negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada tahun 1990 yang lalu, perhatian masyarakat terhadap masalah kemiskinan kembali digugah setelah cukup lama tidak banyak diperbincangkan di media massa. Perhatian masyarakat tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia (1990) di media massa yang memuji

keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut Bank Dunia, Indonesia telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara relative dari 40,08 persen pada tahun 1976 menjadi 17,42 persen dari jumlah populasinya pada tahun 1987.⁴ Suatu penurunan angka kemiskinan yang cukup drastic hanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Ternyata kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa secara absolute jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih cukup banyak, yaitu 22,6 juta jiwa pada tahun 1996, selain itu, masih banyak pula penduduk Indonesia yang pendapatannya hanya sedikit sekali diatas batas garis kemiskinan.⁵ Kelompok nyaris miskin ini sangat rawan terhadap perubahan-perubahan keadaan ekonomi, seperti adanya kenaikan harga pada komoditas-komoditas kebutuhan pokok, atau meenurunnya laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap perlu menjadi perhatian serius karena tujuan utama dari pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

⁴ Arsyad. Lincolin, Ekonomi Pembangunan Edisi 5 (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2010), Hal.298

⁵ Ibid., Hal.298

Tabel I.1
Angka kemiskinan di Indonesia

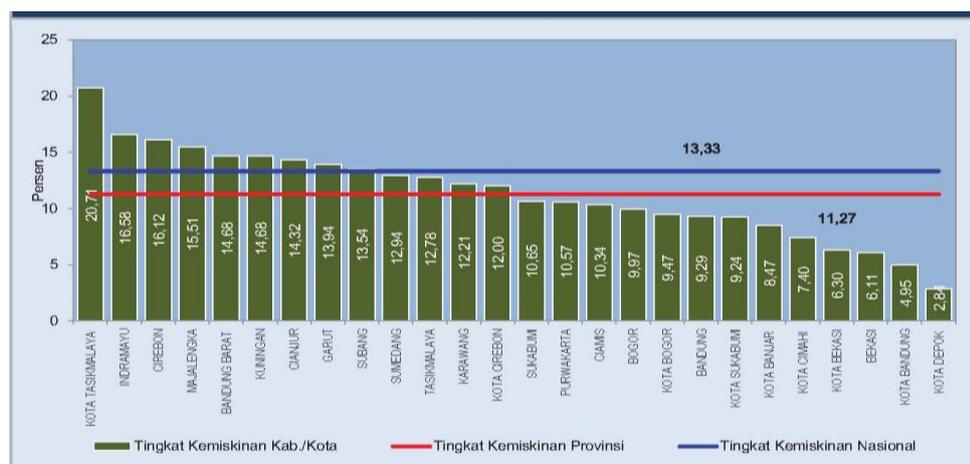
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2003	12.26	25.08	37.34	13.57	20.23	17.42
2004	11.37	24.78	36.15	12.13	20.11	16.66
2005	12.40	22.70	35.10	11.68	19.98	15.97
2006	14.49	24.81	39.30	13.47	21.81	17.75
2007	13.56	23.61	37.17	12.52	20.37	16.58
2008	12.77	22.19	34.96	11.65	18.93	15.42
2009	11.91	20.62	32.53	10.72	17.35	14.15
2010	11.10	19.93	31.02	9.87	16.56	13.33
2011	11.05	18.97	30.02	9.23	15.72	12.49
Sep-12	10.51	18.09	28.59	8.60	14.70	11.66
Mar-13	10.33	17.74	28.07	8.39	14.32	11.37

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2013*

Data statistic tentang angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2003-2013 diatas menunjukkan bahwa angkat kemiskinan di Indonesia masih fluktuatif yaitu mengalami penurunan dan peningkatan. Pemerintah harus mencari cara yang terbaik agar angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang stabil tanpa adanya peningkatan.

Bekasi, sebagai salah satu kota satelit yang berada sangat dekat dengan ibukota Indonesia yaitu Jakarta, masih belum lepas dari bayang-bayang kemiskinan. Pada awalnya, masyarakat Bekasi memiliki struktur perekonomian yang agraris, yang artinya hampir sebagian besar masyarakat Bekasi berprofesi sebagai petani atau bercocok tanam. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, Bekasi mengalami perubahan struktur perekonomian dari yang awalnya berstruktur agrarial, kini telah

menjadi industrial. Perubahan struktur perekonomian inilah yang menyebabkan masyarakat Bekasi mengalami kemiskinan, karena harus kehilangan pekerjaannya sebagai petani dan harus merubah pekerjaannya kearah yang lebih industrial.



Sumber: *Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2011*

Gambar I.1

Tingkat Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota

Grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang ada menurut kota/kabupaten se Jawa Barat bahwa kemiskinan yang ada di Bekasi sebesar 6,30 persen. Bekasi terbilang kalah dibandingkan dengan Kota Depok yang sejatinya merupakan kota satelit bagi DKI Jakarta yang merupakan ibukota dari Indonesia.

Tabel I.2
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jlwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
BOGOR	197 319	214 338	10,81	9,97	446 037	474 559
SUKABUMI	174 793	184 127	11,78	10,65	265 482	248 987
CIANJUR	192 176	202 438	14,14	14,32	311 108	310 292
BANDUNG	203 702	217 452	8,29	9,29	238 834	294 907
GARUT	167 190	180 406	15,70	13,94	365 392	334 619
TASIKMALAYA	172 491	186 126	13,50	12,78	233 244	214 103
CIAMIS	193 652	208 960	11,23	10,34	174 533	158 281
KUNINGAN	183 795	200 171	15,91	14,68	174 789	152 198
CIREBON	211 501	230 346	18,22	16,12	390 540	332 797
MAJALENGKA	241 830	263 377	17,12	15,51	207 154	180 924
SUMEDANG	216 053	230 637	13,69	12,94	145 340	141 109
INDRAMAYU	242 931	264 576	17,99	16,58	319 528	275 712
SUBANG	219 956	234 803	14,13	13,54	201 781	197 931
PURWAKARTA	211 820	226 118	10,48	10,57	84 718	89 986
KARAWANG	239 832	266 597	12,90	12,21	264 825	259 429
BEKASI	244 603	271 901	5,97	6,11	136 667	160 472
BANDUNG BARAT	202 705	216 388	16,03	14,68	232 687	222 135
KOTA BOGOR	256 414	278 530	8,82	9,47	91 714	89 795
KOTA SUKABUMI	269 925	284 339	9,16	9,24	30 426	27 622
KOTA BANDUNG	262 093	279 784	4,50	4,95	110 283	118 316
KOTA CIREBON	230 810	251 375	13,06	12,00	44 958	35 467
KOTA BEKASI	299 432	332 849	5,78	6,30	134 170	147 119
KOTA DEPOK	283 218	310 279	2,93	2,84	47 130	49 253
KOTA CIMAH	262 440	280 155	7,10	7,40	46 435	39 999
KOTA TASIKMALAYA	243 897	263 177	23,55	20,71	140 109	131 317
KOTA BANJAR	179 144	193 305	8,64	8,47	14 634	14 826
JAWA BARAT	191 985	201 138	11,98	11,27	4 852 518	4 702 153
INDONESIA	200 262	211 726	14,16	13,33	32.630.000	31.023.390

Sumber: *Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2011*

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Bekasi pada tahun 2009 dan 2010 masih berada dibawah Kota Depok dan Kota Bogor yang merupakan kota satelit dari Provinsi DKI Jakarta selain Kota Bekasi dan Tangerang. Penduduk miskin Kota Bekasi menurut data Badan Pusat Statistik tercatat sebanyak 134.170 jiwa pada tahun 2009 dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 147.119, sedangkan penduduk miskin Kota Bogor pada 2009 dan 2010 tercatat sebanyak 91.714 dan 89.769 jiwa. Kota Depok tercatat sebanyak 47.130 jiwa dan 49.263 jiwa yang tercatat sebagai penduduk miskin pada tahun 2009 dan 2010.

Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Factor yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin terdapat hubungan yang negative antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan betapa pentingnya usaha pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar dapat mengurangi angka kemiskinan yang terjadi disetiap Negara Sedang Berkembang (NSB) seperti Indonesia.

Factor yang kedua adalah pendapatan per kapita penduduk. Tingginya pertumbuhan pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila tidak disertai dengan perbaikan dalam hal distribusi pendapatan. Peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk Indonesia, sementara sebagian besar penduduk yang saat ini hidup dalam kemiskinan tidak dapat menikmati pencapaian tersebut.⁶ Dengan kata lain, meskipun ekonomi tumbuh dengan baik, tetapi mereka tetap berada dalam kemiskinan. Peningkatan gaji, upah, honor dan bentuk lainnya yang selama ini terjadi di Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian orang. Peningkatan gaji, upah, honor dan bentuk lainnya tersebut tidak sampai menyentuh pada kelompok yang berada pada garis kemiskinan.

⁶ <https://laelyrakhmawati.wordpress.com/2014/04/21/faktor-yang-mempengaruhi-kemiskinan/> diakses pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 17.05 WIB

Factor ketiga yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah rasio ketergantungan penduduk. Besarnya penduduk yang beraktifitas sebagai ibu rumah tangga, menganggur dan sedang sekolah akan semakin memperbesar rasio ketergantungan penduduk. Meningkatnya rasio ketergantungan akan meningkatkan proporsi populasi yang hidup dalam kemiskinan. Angka kelahiran yang tinggi berdampak pada tingginya rasio ketergantungan yang tinggi. Kemiskinan akan meningkat seiring meningkatnya rasio ketergantungan penduduk. Factor penyebab tingginya rasio ketergantungan penduduk adalah tingginya angka kelahiran. Sebagai contoh apabila dalam suatu keluarga mempunyai 3 (tiga) anak, berarti dalam keluarga tersebut terdapat 5 (lima) jiwa, semakin besar jumlah anak maka akan semakin besar jumlah tanggungan yang harus ditanggung oleh kepala keluarga, selanjutnya semakin besar jumlah penduduk yang tergabung dalam usia tidak produktif maka semakin besar tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Factor keempat yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan menjadi pondasi utama untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, maka akan semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak karena selama menempuh jenjang pendidikan mereka diberikan keterampilan, ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Apabila seseorang hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka ilmu pengetahuan, keterampilan dan wawasannya pun juga rendah sehingga tidak mampu untuk bersaing

mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada pengangguran. Dengan jenjang pendidikan yang semakin tinggi, masyarakat mudah untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhindar dari kemiskinan.

Factor kelima yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Peningkatan pengangguran di Negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan kesempatan kerja daripada pertumbuhan yang cepat dari angkatan kerja. Program-program untuk meningkatkan kesehatan, nutrisi, pendidikan, pembangunan perkotaan, distribusi pendapatan dan kesempatan bagi wanita dapat mengurangi kelahiran dan pertumbuhan penduduk, sehingga akan menurunkan angka angkatan kerja berumur 15-20 tahun.

Faktor keenam yang mempengaruhi kemiskinan adalah inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Apabila kenaikan harga-harga ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, tentu akan menyebabkan masyarakat tertindas, khususnya masyarakat yang tidak atau sedang mencari pekerjaan. Kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak dapat terpenuhi akibat adanya inflasi dan tidak adanya pendapatan yang diperoleh karena tidak atau sedang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat masyarakat yang khususnya tidak mempunyai atau sedang mencari pekerjaan tidak dapat memenuhi taraf standar hidupnya sehingga menyebabkan kemiskinan yang meningkat.

Upah menjadi factor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Pada zaman yang sudah modern seperti saat ini, semua kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sudah mengalami kenaikan dari segi harga. Hal itu membuat masyarakat yang berprofesi sebagai buruh mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah yang dihadapi dalam persoalan upah seperti kita ketahui, akhir-akhir ini sering terjadi demo buruh yang menuntut untuk menaikkan upah minimum. Masalahnya adalah tidak adanya kesepakatan antara buruh dengan perusahaan dalam hal upah yang akan diterima oleh buruh tersebut dan ketidakpuasan buruh dalam menerima upah yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Buruh merasa dengan upah yang mereka saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan apabila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tentu akan muncul masalah baru yaitu kemiskinan.

Factor-faktor diatas membuat peluang terjadinya kemiskina menjadi semakin besar, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti kemiskinan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan bahwa tingginya tingkat kemiskinan juga disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan?
2. Apakah terdapat pengaruh pendapatan per kapita penduduk terhadap kemiskinan?

3. Apakah terdapat pengaruh tingkat ketergantungan rasio penduduk terhadap kemiskinan?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan?
5. Apakah terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan?
6. Apakah terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap kemiskinan?
7. Apakah terdapat pengaruh tingkat upah terhadap kemiskinan?

C. Pembatasan Masalah

Dari indentifikasi masalah diatas, ternyata masalah tingginya tingkat kemiskinan memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi antara lain : dana, waktu, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah :

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Bekasi?
- 2) Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Bekasi?
- 3) Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Bekasi?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, baik secara teoretis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan wawasan dan menambah pengetahuan baru tentang ekonomi makro khususnya tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan kemiskinan di Kota Bekasi.
2. Secara praktis, sebagai bahan referensi yang dapat dipergunakan untuk mengetahui gambaran mengenai ada tidaknya pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Bekasi.
3. Sebagai bahan pertimbangan yang relevan bagi peneliti di masa yang akan datang, serta dapat digunakan sebagai salah satu instrument penelitian.